

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1      **Infrastruktur Wilayah dan Kota****

Infrastruktur diartikan sebagai sistem penghubung antara aktivitas ekonomi, aktivitas sosial serta distribusi produksi barang dan jasa dalam cakupan wilayah (Kodoatie, 2005). Sehingga infrastruktur dikenal sebagai bentuk fasilitas fisik akan kebutuhan publik untuk menyediakan kebutuhan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan umum untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial sebagai fungsi pemerintahan (Stone, 1974). Infrastruktur termuat dalam sistem yang terstruktur pada konstruksi bangunan, peralatan instalasi untuk menjalankan fungsinya memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi (Grigg, 2000). Sehingga infrastruktur dapat dibagi menjadi 13 kategori yang diantaranya (Grigg, 1998):

1. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air
2. Sistem pengelolaan limbah terdiri dari pengumpul, pengolahan, pembuangan daur ulang
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat)
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi
5. Fasilitas lintas air dan navigasi
6. Fasilitas transportasi terdiri dari jalan, rel bandar udara yang didalamnya terdapat rambu-rambu lalu lintas hingga fasilitas pengontrol
7. Sistem transir publik
8. Sistem kelistrikan terdiri dari produksi dan distribusi
9. Fasilitas gas alam
10. Gedung publik terdiri dari sekolah dan rumah sakit
11. Fasilitas perumahan publik
12. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain seperti stadion
13. Komunikasi

Dimana, fasilitas-fasilitas tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok, yang meliputi:

1. Infrastruktur transportasi (jalan, jalan raya, jembatan)
2. Infrastruktur pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan)
3. Infrastruktur komunikasi
4. Infrastruktur keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa)
5. Infrastruktur pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat)
6. Infrastruktur bangunan
7. Infrastruktur distribusi dan produksi energi

Selain itu, pada fasilitas infrastruktur yang telah disebutkan. Infrastruktur tersebut dibedakan sesuai dengan fungsinya yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial (Familono, 2004). Dimana infrastruktur ekonomi merupakan fasilitas dalam mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah, sedangkan infrastruktur sosial merupakan penyediaan fasilitas untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan khusus. Sehingga infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup (PP. No 38 Tahun 2015) :

1. Infrastruktur transportasi;
2. Infrastruktur jalan;
3. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. Infrastruktur air minum;
5. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat;
7. Infrastruktur pengelolaan persampahan;
8. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. Infrastruktur ketenagalistrikan;
10. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
11. Infrastruktur konservasi energi;
12. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
14. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan kesenian;

15. Infrastruktur kawasan;
16. Infrastruktur pariwisata;
17. Infrastruktur kesehatan;
18. Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan
19. Infrastruktur perumahan rakyat.

Adanya infrastruktur dalam suatu wilayah sangat penting, perannya dalam memperlancar aktivitas manusia dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan manusia, dikarenakan dalam melakukan aktivitas manusia tidak terlepas dari bantuan dan dukungan pelayanan fasilitas infrastruktur.

## **2.2 Infrastruktur Transportasi**

Infrastruktur transportasi merupakan fasilitas pelayanan distribusi pergerakan barang maupun orang berupa jalan, rel kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara sebagai fungsi memperluas interaksi barang/orang dalam wilayah atau Negara (Palilu, 2018). Infrastruktur transportasi memegang kendali dalam membuka peluang hubungan perdagangan antar wilayah, perluasan pasar, distribusi barang, dan aksesibilitas penduduk guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini fokus infrastruktur transportasi yang dimaksud adalah (1) infrastruktur jalan berupa jalan tol (*ways infrastructure*) dan (2) pelabuhan laut (*seaport infrastructure*) dan bandara.

### **2.2.1. Jalan Tol**

Jalan tol merupakan lintas alternatif dari ruas jalan umum dan tergolong sebagai jalan nasional dimana penggunaannya diwajibkan membayar tol saat akan menggunakan jalan tol (PP No. 15 Tahun 2005). Adanya jalan tol dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan pergerakan ekonomi maupun sosial dengan lebih cepat. Jalan tol umumnya dibangun dengan skala dan modal besar termasuk pembebasan lahan untuk mendirikan bangunan tersebut. Sehingga dengan kelebihanannya jalan tol dicanangkan sebagai lintas alternatif jalan untuk mengurangi kemacetan dan mendorong pemasukan kas negara (PP No. 15

Tahun 2005). Melalui penyelenggaraan jalan tol diharapkan mampu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan. Selain itu, jalan tol sendiri dalam penyelenggaraannya memiliki gerbang tol yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Menghubungkan jalan umum dengan jalan tol;
- b. Sebagai tempat transaksi membayar tol; dan
- c. Tidak diperuntukkan sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang, barang, ataupun hewan.

### **2.2.2 Pelabuhan**

Pelabuhan merupakan tempat yang digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyebrangan yang terletak di laut atau di sungai. Pelabuhan terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan yang diperuntukkan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi (PM No. 57 Tahun 2020). Pelabuhan memiliki peran sebagai pintu gerbang suatu wilayah sekaligus memperlancar hubungan antar wilayah lokal hingga internasional. Pelabuhan memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam PP No. 11 tahun 1983 berikut penjelasannya:

- a. Antarmuka (*interface*)  
Sebagai tempat pertemuan antar moda/sistem transportasi darat dan laut untuk memfasilitasi perpindahan barang dan orang ke angkutan darat maupun sebaliknya.
- b. Mata rantai (*link*)  
Berfungsi dalam menopang kegiatan transportasi secara keseluruhan, sehingga disebut sebagai pelabuhan mata rantai dari sistem transportasi
- c. Gerbang (*gateway*)  
Merupakan pintu gerbang suatu Negara, daerah bahkan antar pulau yang dipisah oleh lautan.
- d. Entitas industri (*industry entity*)

Pelabuhan untuk mendukung perkembangan industri yang berorientasi pada kegiatan ekspor suatu Negara atau daerah.

Pelabuhan juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam segi tinjauan (Triatmodjo, 1996) diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Segi Penyelenggaraan

1) Pelabuhan umum

Pelabuhan umum diselenggarakan guna kepentingan pelayanan masyarakat umum.

2) Pelabuhan khusus

Pelabuhan khusus digunakan untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan tertentu dengan syarat dapat digunakan untuk kepentingan umum saat terjadi keadaan tertentu dan diikuti ijin khusus dari Pemerintah.

b. Segi Kegunaan

1) Pelabuhan barang

Pelabuhan barang ini difasilitasi oleh dermaga yang berfungsi sebagai tempat bongkar muat.

2) Pelabuhan Penumpang

Pelabuhan penumpang melayani kegiatan berpergian masyarakat dan juga melayani bongkar muat, walaupun fungsi bongkar muat cenderung lebih sedikit dibandingkan pelabuhan barang.

3) Pelabuhan campuran

Pelabuhan campuran difungsikan untuk keperluan kegiatan penumpangan dan kegiatan barang. Biasanya merupakan pelabuhan kecil dan masih tahap perkembangan.

4) Pelabuhan minyak

Pelabuhan ini difokuskan untuk melayani aktivitas pasokan minyak. Karena memperhatikan faktor keamanan maka letak atau posisi pelabuhan ini berjauhan dari wilayah atau daerah keperluan umum.

5) Pelabuhan ikan

Pelabuhan ikan difungsikan untuk melayani aktivitas para nelayan. Pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas pasar lelang ikan, alat pengawet, persediaan bahan bakar.

6) Pelabuhan militer

Pelabuhan ini difokuskan untuk aktivitas militer. Pelabuhan ini diharuskan pada perairan yang cukup luas serta letak tempat bongkar muat dan melayani aktivitas perang.

c. Segi Usaha

1) Pelabuhan yang diusahakan

Pelabuhan difungsikan sebagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh setiap kapal saat memasuki pelabuhan dengan tujuan kegiatan tertentu.

2) Pelabuhan yang tidak diusahakan

Merupakan pelabuhan untuk sandar kapal dengan tidak dikenakan bea cukai, boker muat dan lainnya.

d. Segi Fungsi Perdagangan Nasional dan Internasional

1) Pelabuhan laut

Merupakan pelabuhan yang dapat dengan bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing dan ramai dikunjungi kapal asing untuk aktivitas ekspor/impor.

2) Pelabuhan pantai

Pelabuhan ini diperuntukkan guna perdagangan dalam negeri, dan kapal berbendera asing dengan menggunakan izin khusus.

e. Segi Letak Geografis

1) Pelabuhan buatan

Pelabuhan buatan terletak di daerah dengan perairan yang dilindungi oleh pengaruh gelombang dengan membuat pemecah gelombang (*breakwater*).

2) Pelabuhan alam

Pelabuhan alam ini tertelak pada daerah perairan yang terlindungi oleh badai dan gelombang secara alami, seperti pelabuhan di suatu pulau, jazirah atau teluk, dan muara sungai.

3) Pelabuhan semi alam

Merupakan pelabuhan campuran antara pelabuhan buatan dan pelabuhan alam. Contohnya pelabuhan Bengkulu yang terlindungi oleh pantai namun pada jalur masuk memiliki bangunan buatan untuk melindungi pelabuhan.

### **2.2.3 Bandar Udara**

Bandar udara adalah tempat berfungsinya pesawat udara mendarat, lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan perpindahan antarmoda transportasi yang dipenuhi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas pokok dan penunjang lainnya (PM No. 39 Tahun 2019). Disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2019 bahwa peran dari bandar udara adalah sebagai berikut:

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. Pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. Pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana; dan
- f. Prasarana guna memperkuat wawasan nusantara dan kedaulatan Negara.

Dalam penggunaannya bandar udara terbagi menjadi 5 jenis penggunaan, diantaranya adalah:

- a. Bandar udara umum, adalah bandar udara yang digunakan untuk kepentingan umum
- b. Bandar udara domestik, adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
- c. Bandar udara internasional, adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

- d. Bandar udara pengumpul (*Hub*), adalah bandar udara yang penggunaannya mencakup pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar serta mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
- e. Bandar udara pengumpan (*Spoke*), adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

### **2.3 Perkembangan Kota**

Perkembangan kota merupakan proses perubahan kondisi atau keadaan pada waktu yang berbeda dengan kondisi dan keadaan yang berbeda setiap waktunya (Yunus, 2005), yang mana gambaran perkembangan kota secara spesifik dapat diperoleh melalui hal-hal yang menyangkut proses perkembangan kota (Branch, 1995 dalam Yunus, 2011) seperti yang dijelaskan oleh Hendarto, 1997 bahwa perkembangan kota dapat diukur dari segala perubahan kota meliputi perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, hingga perubahan fisik. Perkembangan tersebut juga dapat diketahui melalui proses yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak, kecil menjadi besar dan dari ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas (Widyaningsih, 2001). Sehingga dapat dijelaskan berdasarkan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kota (Branch, 1995) adalah sebagai berikut:

- a. Geografis

Letak geografis kota sangat mempengaruhi fungsi kota, seperti simpul distribusi perlu berlokasi di simpul jalur transportasi pada pertemuan jalur transportasi regional seperti terdapat pelabuhan laut.

- b. Tapak (*Site*)

Topografi sangat menentukan kota untuk bisa berkembang ke segala arah, seperti pada topografi yang datar dan rata berbeda pada daerah pegunungan perkembangan kota biasanya sulit untuk menyebar.

- c. Fungsi Kota

Diketahui bahwa kota yang memiliki banyak fungsi secara ekonomi akan lebih cepat dan kuat untuk berkembang pesat dibandingkan kota dengan fungsi tunggal.

d. Sejarah dan Kebudayaan

*Culture* masyarakat akan sangat mempengaruhi proses perkembangan kota, seperti kota yang sejarahnya berpotensi menjadi Ibukota akan berbeda perkembangannya dengan kota yang sengaja menghindari perkembangan tersebut.

e. Unsur-unsur Umum

Terdapat kelengkapan jaringan jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas akan membentuk kota ke arah tertentu.

## 2.4 Lahan

Didefinisikan bahwa lahan merupakan suatu lingkungan fisik berupa tanah, iklim, relief, hidrologi, vegetasi dan benda-benda yang berada di permukaan lahan dan dimanfaatkan bagi pengguna lahan untuk kegiatan manusia dari masa lampau maupun sekarang dan masa depan (FAO, 1976 dalam Arsyad, 1989: 207).

Fungsi lahan terbagi menjadi 2 (dua) (Utomo *et all*, 1992) yaitu sebagai fungsi kegiatan dan fungsi lindung. Lahan sebagai fungsi kegiatan yakni lahan yang dapat dimanfaatkan untuk peruntukkan lahan berupa permukiman, perkebunan, hutan produksi. Sedangkan lahan sebagai fungsi lindung yaitu lahan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah budaya bangsa.

Sehingga, jika dikategorikan secara garis besar peruntukan lahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) (Chapin 1979) diantaranya adalah sebaagi berikut:

**TABEL 2. 1 KLASIFIKASI PERUNTUKAN LAHAN**

No.	Sumber Klasifikasi	Klasifikasi Tutupan Lahan	Contoh	Hasil Komparasi
1	Chapin	Lahan terbangun	Industri, komersial, permukiman, dan campuran	<b>Lahan Terbangun :</b> Kawasan perumahan dan permukiman, industri, kawasan

No.	Sumber Klasifikasi	Klasifikasi Tutupan Lahan	Contoh	Hasil Komparasi
2		Lahan non terbangun	Pertanian, lahan kosong, dan konservasi	pendidikan, komersial, dan campuran
1	Keeble dalam Jayadinata	Lahan terbangun	Kawasan perumahan, industri, dan kawasan pendidikan	<b>Lahan non Terbangun :</b> Ruang terbuka, lahan kosong, pertanian, dan konservasi
2		Lahan non terbangun	Ruang terbuka dan lahan kosong	<b>Badan Air :</b> Perairan, tambak, pesisir, bendungan, dan sungai
3		Badan air	Peraian, Tambak, Pesisir, bendungan, dan Sungai	

Sumber: Chapin, 1979

Melalui definisi tersebut dapat diidentifikasi bahwa lahan merupakan bagian dari sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi manusia, lahan dapat mendukung keberlangsungan hidup manusia melalui penyediaan tempat/media untuk manusia melangsungkan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya, sehingga lahan selalu diolah untuk dapat mencukupi kebutuhan manusia, mengingat lahan merupakan suatu sumber daya alam yang terbatas (Widiatmaka et al., 2015). Maka dalam pengolahan peruntukan lahan membutuhkan penataan, pengarahan, dan rencana peruntukan alokasi penggunaan lahan sesuai kebutuhan manusia, karena lahan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Pangarso, 2001 dalam Zulhandika *et all*, 2017).

## 2.5 Penduduk

Penduduk diartikan sebagai individu yang berkediaman selama 6 bulan atau lebih maupun berkediaman kurang dari 6 bulan namun memiliki niat untuk menetap di wilayah geografis Republik Indonesia. Penduduk juga dijelaskan sebagai sejumlah individu yang mendiami suatu wilayah baik sebagai warga Negara atau bukan warga Negara (Kartomo, 2012).

Kependudukan suatu wilayah dipengaruhi oleh pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh beberapa hal, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komposisi penduduk secara umum (BKKBN, 2012) sebagai berikut:

a. Kelahiran (*fertilitas*)

Peluang dalam menghasilkan keturunan melalui kesuburan wanita untuk bereproduksi, sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

b. Kematian (*mortalitas*)

Kematian merupakan menghilangnya tanda-tanda kehidupan individu secara permanen setelah melwati masa kelahiran. Sehingga kematian merupakan bagian dari fenomena penduduk yang mengurangi jumlah penduduknya.

c. Migrasi

Migrasi merupakan proses perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan bertempat tinggal secara permanen. Hal ini biasanya dipicu oleh terdapat perbedaan kualitas kota yang modern dan kualitas kota tradisional atau perdesaan.

Selain itu, pertumbuhan penduduk juga dapat disebabkan oleh lahirnya suatu kawasan dengan potensi berkembang pesat seperti kawasan komersil, industri, serta perdagangan dan jasa (Hilmansyah, 2018). Hal ini mendorong para pengguna lahan mendiami lokasi yang paling strategis untuk menciptakan kegiatan komersial, industri yang diikuti permukiman (Kasraian et al., 2016). Pembukaan kawasan inilah yang akhirnya cenderung menarik individu untuk merubah domisi tempat tinggal mereka ke tempat yang lebih dianggap menguntungkan secara segi ekonomi maupun sosial.

## **2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil unit produksi suatu daerah berupa jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan pada periode tertentu (Rahardja *et all*, 2008). Sehingga PDRB dijadikan sebagai

parameter ekonomi untuk menggambarkan *profile* ekonomi secara makro pada suatu daerah untuk periode tertentu.

Nilai PDRB dapat diketahui berdasarkan 2 (dua) perhitungan menurut harga pasar, yaitu PDRB Harga Berlaku dan PDRB Harga Konstan baik berdasarkan pengeluaran/penggunaan maupun sektoral. PDRB Harga Berlaku merupakan perhitungan jumlah barang dan jasa yang berasal dari harga pasar periode tahun yang bersangkutan. Sedangkan PDRB Harga Konstan merupakan perhitungan jumlah barang dan jasa yang berasal dari harga periode tahun tertentu sebagai tahun dasar. Berikut merupakan rincian data PDRB yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian berdasarkan fungsinya (BPS, 2019) adalah sebagai berikut:

1. PDRB Harga Berlaku menurut sektor (lapangan usaha), menunjukkan struktur dan peran ekonomi setiap sektor dalam suatu daerah.
2. PDRB Harga Berlaku menurut pengeluaran/penggunaan, menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan sebagai tujuan konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri.
3. PDRB Harga Konstan menurut sektor (lapangan usaha), menunjukkan keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor dalam setiap tahun.
4. PDRB Harga Konstan menurut pengeluaran/penggunaan, mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

Sehingga, dapat diketahui bahwa PDRB Harga Konstan merupakan parameter ekonomi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi melalui PDRB segala sektor (Hilmansyah, 2018). Berikut merupakan basis sektor yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2010 (BPS, 2019) adalah sebagai berikut:

**TABEL II. 1 BASIS SEKTOR PDRB 2010**

No	Sektor Produk Domestik Regional Bruto Tahun Dasar 2010
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2	B. Pertambangan dan Penggalian
3	C. Industri Pengolahan
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

No	Sektor Produk Domestik Regional Bruto Tahun Dasar 2010
6	F. Konstruksi
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8	H. Transportasi dan Pergudangan
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10	J. Informasi dan Komunikasi
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi
12	L. Real Estate
13	M, N. Jasa Perusahaan
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15	P. Jasa Pendidikan
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan :  : sektor pembangunan fisik

Melalui rincian sektor-sektor PDRB tahun dasar 2010, diketahui terdapat beberapa sektor yang dianggap menjadi penyumbang PDRB untuk pertumbuhan kota secara fisik diantaranya adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor *Real Estate*, sektor Jasa Perusahaan (Hilmansyah, 2018)